

PEDOMAN PEMBERIAN
TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KKBPK

(Edisi Keempat)

DIREKTORAT BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
JAKARTA, 2019

KATA PENGANTAR

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, Buku Pedoman Pemberian Tanda kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini dapat disusun.

Kekuatan utama Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas adalah dukungan kuat dari pemerintah, pakar, wirausaha, tokoh masyarakat/adat/agama, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri. Melalui pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan ini, BKKBN berharap dukungan dan komitmen mereka terhadap program KKBPK dapat lebih ditingkatkan lagi.

Agar pelaksanaan pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan terukur, maka buku pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sudah ada perlu disempurnakan.

Buku pedoman ini merupakan acuan bagi Perwakilan BKKBN Provinsi dan OPD PPKB Kabupaten/Kota dalam proses pelaksanaan penilaian pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN, sehingga proses dan obyektivitas penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan buku pedoman ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Jakarta, Desember 2019
Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

Dr. dr. M. Yani, M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERATURAN KEPALA BKKBN iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUJUAN 2
C. SASARAN PENGGUNA 2
D. RUANG LINGKUP 3
E. BATASAN PENGERTIAN 3

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5
A. KEBIJAKAN 5
B. STRATEGI 5

BAB III POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN 7
A. PERSIAPAN 7
B. PELAKSANAAN 13
C. PENETAPAN CALON PENERIMA 28
D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 29

BAB IV PENUTUP 31
DAFTAR LAMPIRAN 33



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 62/PER/G2/2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, melibatkan peran serta berbagai pihak di berbagai tingkatan wilayah, baik dari unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra kerja lainnya;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan komitmen dan dukungan berbagai pihak perlu memberikan tanda kehormatan dan tanda penghargaan atas prestasi, komitmen, dukungan dan peran sertanya dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 1

Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi pengelola dalam pelaksanaan pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga akan diatur di dalam Panduan Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN	**:**	**PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**
NOMOR	**:**	**62/PER/G2/2016**
TENTANG	**:**	**PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

PEDOMAN

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

(Edisi Keempat)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program KB Nasional tetapi juga dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkrit penyerasian kebijakan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah. Di samping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib dan konkuren/bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam lampiran I huruf n terdapat 4 sub urusan, 10 kewenangan pemerintah pusat, 6 kewenangan pemerintah provinsi, dan 8 kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

Sebagaimana kita maklumi bersama, berdasar data SDKI Tahun 2017, hasil capaian program masih rendah dari sasaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), antara lain *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) sebesar 63,6% dari target 61,3%, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) sebesar 10,6 dari target 9,91, *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR 15 – 19 tahun) 36 per 1000 perempuan dari target 38 per 1000 perempuan, dan *Total Fertility Rate* (TFR) masih berada di angka 2,4. Rendahnya pencapaian program KKBPK dalam beberapa tahun terakhir ini karena program KKBPK saat ini sudah tidak menjadi program prioritas di daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program KKBPK perlu partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra kerja lainnya dalam penggerakan dan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di

semua tingkatan wilayah sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing. Untuk itu, BKKBN perlu memberikan apresiasi berupa pemberian tanda kehormatan dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berprestasi dalam program KKBPK.

B. TUJUAN

1. Umum

Sebagai acuan bagi unit kerja BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi dan, Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota, serta mitra kerja terkait dalam mempersiapkan, menilai dan menetapkan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Khusus

a. Terselenggaranya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan (SP);
b. Terselenggaranya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (SWK);
c. Terselenggaranya pemberian Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK);
d. Terselenggaranya pemberian Tanda Penghargaan Wira Karya Kencana (WKK);
e. Terselenggaranya pemberian Tanda Penghargaan Dharma Karya Kencana (DKK);
f. Terselenggaranya pemberian Tanda Penghargaan Cipta Karya Kencana (CKK).

C. SASARAN PENGGUNA

Sasaran pengguna pedoman ini adalah :

a. Unit kerja BKKBN Pusat dan Provinsi;
b. Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota;
c. Mitra kerja.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penulisan pedoman ini meliputi pendahuluan, kebijakan dan strategi, pokok-pokok pelaksanaan pemberian tanda kehormatan dan penghargaan, serta penutup.

E. BATASAN PENGERTIAN

1. **Satyalancana Pembangunan (SP)**

   Adalah **Tanda Kehormatan** dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berkomitmen, berjasa dan berprestasi dalam pelaksanaan program KKBPK di wilayahnya.

2. **Satyalancana Wira Karya (SWK)**

   Adalah **Tanda Kehormatan** dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada perorangan yang berjasa, berprestasi, berkomitmen, dan memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Program KKBPK di wilayahnya, sehingga dapat dijadikan panutan dan teladan bagi orang lain.

3. **Manggala Karya Kencana (MKK)**

   Adalah **penghargaan tertinggi** dari Kepala BKKBN yang diberikan kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tingkat Provinsi, dan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota atas prestasi, komitmen, dukungan dan dharma baktinya yang besar serta kepemimpinannya dalam pelaksanaan program KKBPK di wilayahnya.

4. **Wira Karya Kencana (WKK)**

   Adalah penghargaan dari Kepala BKKBN yang diberikan kepada seseorang sebagai **tenaga profesi**, yang memberikan komitmen, dukungan serta dharma baktinya secara nyata dalam pelaksanaan Program KKBPK, sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

5. **Dharma Karya Kencana (DKK)**
   Adalah penghargaan dari Kepala BKKBN yang diberikan kepada pimpinan institusi/mitra kerja yang memberikan komitmen, dukungan serta dharma baktinya melalui penyediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan Program KKBPK, sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

6. **Cipta Karya Kencana (CKK)**
   Adalah penghargaan dari Kepala BKKBN yang diberikan kepada seseorang yang memberikan/menciptakan karya nyata, dalam mendukung pelaksanaan Program KKBPK, sehingga dapat dijadikan contoh teladan bagi orang lain.

7. **Pemangku Kepentingan**
   Yang dimaksud pemangku kepentingan dalam Pedoman ini adalah penentu kebijakan dari lembaga pemerintah pusat, kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota yang memberikan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan program KKBPK.

8. **Mitra Kerja**
   Yang dimaksud mitra kerja dalam Pedoman ini adalah organisasi swasta atau lembaga swadaya organisasi masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program KKBPK.

9. **Tenaga Profesi**
   Yang dimaksud tenaga profesi dalam Pedoman ini adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan berilmu pengetahuan khusus) tertentu yang mendukung pelaksanaan Program KKBPK di wilayahnya (dokter, bidan, dosen, guru, peneliti).

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mencapai tujuan pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu disusun kebijakan dan strategi yang dapat memayungi tata cara dan prosedur serta persyaratan dalam Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan di lingkungan BKKBN, sebagai berikut :

A. KEBIJAKAN

1. Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berdasarkan prestasi dan keberhasilan dalam pelaksanaan program KKBPK;

2. Tanda Kehormatan dan Penghargaan diberikan oleh Presiden dan Kepala BKKBN atas dasar usulan, penilaian dan prestasi kerja, pengabdian dan kepemimpinannya dalam melaksanakan program KKBPK;

B. STRATEGI

1. Mendorong pemangku kepentingan dan mitra kerja serta perseorangan berperan aktif dalam pelaksanaan program KKBPK;

2. Melakukan penilaian hasil pelaksanaan program KKBPK sesuai dengan masing-masing jenis penghargaan;

3. Memberikan Tanda Kehormatan dan Penghargaan dalam rangka meningkatkan dedikasi, prestasi kerja, kemampuan profesional kepada Gubernur, Bupati, Walikota, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama/Masyarakat, Ketua TP PKK Tingkat Provinsi, Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten/ Kota, serta perseorangan atas prestasi kerja, pengabdian dan kepemimpinannya dalam pelaksanaan program KKBPK.

BAB III

POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN

A. PERSIAPAN

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim

Untuk dapat terlaksananya pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN untuk Tim Pusat, **Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Tim Provinsi, dan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota untuk Tim Kabupaten dan Kota.**

Tim terdiri dari unsur BKKBN/mitra kerja yang terkait, dengan tugas sebagai berikut:

a. **Pelindung,** mempunyai tugas:

1) Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis Pusat Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan;
2) Menyetujui hasil penilaian dan menetapkan nama-nama penerima Tanda Penghargaan (MKK, DKK, WKK,dan CKK) dalam Surat Keputusan;
3) Mengusulkan kepada Presiden nama-nama calon yang akan menerima tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan (SP) dan Satyalancana Wira Karya (SWK).

b. **Tim Pengarah,** mempunyai tugas :

1) Memberikan arahan mengenai pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Tim Teknis;
2) Merekomendasikan usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Pelindung.

c. **Penanggung Jawab,** mempunyai tugas :

1) Bertanggung jawab terhadap hasil penilaian Tim Teknis pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan;
2) Merekomendasikan usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Tim Pengarah untuk ditetapkan dalam Rapat Pimpinan;
3) Melaporkan hasil usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan kepada Pelindung.

d. **Tim Teknis Pusat,** mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana kerja Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan;
2) Melaksanakan tugas administratif dalam proses pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan;
3) Melakukan verifikasi dan validasi data capaian program calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis Penilai Provinsi;
4) Mengirimkan nama-nama calon penerima Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya ke Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI untuk dilakukan klarifikasi;

5) Membuat Berita Acara (BA) hasil verifikasi dan validasi data usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan dan diserahkan kepada Penanggung Jawab.
6) Mengajukan surat permohonan rekomendasi dari Ketua TP PKK Pusat terhadap calon penerima penghargaan SWK dan MKK bagi Ketua TP PKK Provinsi.
7) Mengirimkan nama-nama calon penerima Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan klarifikasi.
8) Mengajukan surat permohonan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri RI terhadap calon penerima penghargaan Satyalancana Pembangunan bagi Gubernur/Bupati/Walikota.

e. **Tim Teknis Penilai Provinsi,** mempunyai tugas :
1) Melaksanakan tugas administratif dalam proses pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan;
2) Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan sesuai dengan formulir checklist kelengkapan berkas (Terlampir);
3) Melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan bobot penilaian dalam Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan;
4) Membuat Berita Acara Hasil Penilaian (BAHP) dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Teknis Penilai Provinsi;
5) Mengirimkan dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan (1 calon 1 dokumen),

Berita Acara Hasil Penilaian, beserta formulir *checklist* kelengkapan berkas yang telah ditandatangani Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ke Tim Teknis Pusat (disatukan dalam satu berkas yang disegel dan distempel resmi).

f. **Tim Teknis Kabupaten dan Kota,** mempunyai tugas :

1) Mengidentifikasi nama-nama calon penerima yang layak memperoleh Tanda Kehormatan dan Penghargaan di wilayahnya;
2) Menyusun kelengkapan dokumen nama-nama calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan;
3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Teknis Kabupaten dan Kota;
4) Mengirimkan dokumen/berkas (dibuat untuk masing-masing calon) dan BAP usulan penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan yang telah ditandatangani Kepala SKPD KB Kabupaten/Kota dan disatukan dalam satu berkas yang disegel dan distempel resmi ke Tim Teknis Penilai Provinsi.

Adapun Susunan Tim adalah sebagai berikut:

1) Tim Pusat

a) Pelindung : Kepala BKKBN
b) Pengarah : Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN
c) Penanggung Jawab : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
d) Tim Teknis Pusat :

- Ketua : Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
- Anggota :
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat yang terkait
  - Ketua Pokja IV TP PKK Pusat
- Keanggotaan Tim Teknis Penilai Pusat dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis.

2) Tim Teknis Penilai Provinsi

a) Penanggung Jawab : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

b) Tim Teknis Provinsi, terdiri dari :

- Ketua : Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi
- Anggota :
  (1) Para Pejabat Eselon III di Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai Pembina Wilayah Kab/Kota
  (2) Ketua Pokja IV TP PKK Provinsi
  (3) Unsur OPD lintas sektor dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan jenis penghargaan

3) **Tim Teknis Kabupaten/Kota**

a) Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota

b) Tim Teknis terdiri dari :

- Ketua : Kepala Dinas Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota
- Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota
- Anggota : (1) Para Pejabat Eselon III di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota
  (2) Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten dan Kota
  (3) Unsur lintas sektor dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan

2. Perencanaan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan ditentukan oleh adanya rencana kegiatan yang kongkrit dan terjadwal, serta komitmen dari semua pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya. Penetapan rencana kegiatan dalam pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan agar dilakukan dengan tepat, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu meliputi :

a. Kategori jenis penghargaan apa yang akan diberikan;

b. Siapa dan dari mana usulan calon, apakah dari unsur tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota;

c. Persyaratan calon dan kriteria yang diperlukan dari tiap kategori penghargaan;
d. Kapan Tim mulai bekerja, dan bagaimana mekanisme kerja;
e. Menentukan jadwal kegiatan.

3. **Jadwal Kegiatan**

Kegiatan pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan bidang KKBPK harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk setiap tahapannya. **(Lihat Lampiran 2)**

B. PELAKSANAAN

1. **Persyaratan**

Persyaratan adalah kelengkapan berkas usulan yang harus dipenuhi oleh setiap calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan serta berkas data pendukung yang akan dijadikan bahan penilaian oleh Tim Teknis Penilai Provinsi, terdiri dari :

a. **Persyaratan Satyalancana Pembangunan (SP)**

1) **Syarat Administrasi**

a) Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan (melampirkan SK Jabatan);
b) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menerima penghargaan MKK (melampirkan fotokopi piagam penghargaan MKK);
c) Daftar riwayat hidup;
d) Pas foto 4x6 berwarna (2 lembar);
e) Surat Rekomendasi dari :
- Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur (diurus oleh Tim Pusat)
- Gubernur bagi Bupati/Walikota

f) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah terlibat dalam masalah hukum yang diterbitkan

Pengadilan Negeri/Kejaksaan;

g) Profil Gubernur, Bupati atau Walikota berisi data dan informasi mengenai keberhasilan pembangunan dalam program KKBPK di wilayahnya (sesuai dengan indikator penilaian Lampiran 3A) dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli untuk tiap calon;

Semua dokumen yang ada dalam persyaratan dijilid dalam satu berkas, disegel dan dikirimkan ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga.

2) Dukungan Komitmen (60%)

a) Jumlah Anak;

b) Bentuk kelembagaan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai UU No. 23/ 2014 dan PP No. 18/2016 (utuh/merger);

c) Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Kampung KB;

d) Persentase dukungan APBD operasional program KKBPK terhadap APBD total dalam 2 tahun terakhir (diluar DAK), dengan melampirkan cukilan RKAKL bidang KKBPK;

e) Mekanisme Operasional Lini Lapangan (Frekuensi Rakor Desa, Staff Meeting, Rakor Kecamatan, Lokmin setiap bulannya);

f) Dukungan operasional di lini lapangan dalam Pembinaan KB/KS (PKB/PLKB, IMP (PPKBD/ Sub PPKBD/Kader), BKB/BKR/PIK-R/M/BKL/ UPPKS);

g) Tersedianya Grand Design Pembangunan Kuantitas Penduduk yang memuat profil dan proyeksi kependudukan.

3) Capaian Program (40%)

a) TFR

b) CPR
c) Unmet Need
d) Jumlah Peserta KB Baru MKJP terhadap KKP
e) Jumlah Peserta KB Baru Non MKJP terhadap KKP
f) ASFR 15-19 th
(sumber data : Susenas terbaru)

b. Persyaratan Satyalancana Wira Karya (SWK)

1) Syarat Administrasi

a) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menerima penghargaan MKK Ketua TP PKK/WKK/DKK/CKK;
b) Melampirkan Surat Rekomendasi dari Bupati/ Walikota atau Gubernur;
c) Memiliki jumlah anak maksimal 2 (dua) orang dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Kelurahan;
d) Daftar riwayat hidup;
e) Pas foto 4x6 berwarna (2 lembar);
f) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah terlibat dalam masalah hukum yang diterbitkan Pengadilan Negeri/Kejaksaan;
g) Profil Calon Penerima Tanda Kehormatan berisi data dan informasi mengenai jasa, prestasi, komitmen, dan darma baktinya dalam pelaksanaan Program KKBPK di wilayahnya (sesuai indikator penilaian Lampiran 3B) dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli untuk tiap calon;

2) Dukungan Komitmen/Prestasi

a) Kesertaan ber-KB (melampirkan fotokopi kartu KB atau surat keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah/swasta);
b) Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang Kependudukan/KB/Pembangunan Keluarga
c) Menjadi narasumber program KKBPK di

forum internasional/ nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir (melampirkan surat undangan permohonan menjadi narasumber atau foto kegiatan);

d) Keaktifan dalam organisasi tingkat nasional/ daerah;

e) Melampirkan fotokopi tulisan/artikel dalam bidang KKBPK yang dipublikasikan di media cetak;

f) Data pendukung lainnya/dokumentasi atas prestasi dan karyanya dalam bidang KKBPK yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat/piagam oleh Perwakilan BKKBN Provinsi atau SKPD KB/Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota.

c. Persyaratan MKK bagi Gubernur/Bupati/Walikota

1) Syarat Administrasi

a) TMT sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan (melampirkan SK Jabatan)

b) Daftar riwayat hidup;

c) Pas foto 4x6 berwarna (2 lembar);

d) Melampirkan Surat Rekomendasi dari :
- Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur (diurus oleh Tim Pusat)
- Gubernur bagi Bupati/Walikota

e) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat dalam Masalah Hukum yang diterbitkan Pengadilan Negeri/Kejaksaan;

f) Profil Gubernur, Bupati atau Walikota berisi data dan informasi mengenai keberhasilan pembangunan dalam program KKBPK di wilayahnya (sesuai indikator penilaian dalam Lampiran 3A) dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli untuk tiap calon;

Semua dokumen yang ada dalam persyaratan dijilid dalam satu berkas, disegel dan dikirimkan ke BKKBN Pusat c.q. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga.

2) Dukungan Komitmen (60%)

a) Jumah Anak;

b) Kelembagaan yang menangani Program KKBPK sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016 (utuh/merger);

c) Jumlah mitra kerja yang dilibatkan dalam pelaksanaan Kampung KB

d) Persentase dukungan APBD operasional program KKBPK terhadap APBD total dalam 2 tahun terakhir (diluar DAK);

e) Mekanisme Operasional Lini Lapangan (Frekuensi Rakor Desa, Staff Meeting, Rakor Kecamatan, Lokmin setiap bulannya)

f) Dukungan operasional di lini lapangan dalam Pembinaan KB/KS (PKB/PLKB, IMP (PPKBD/ Sub PPKBD/Kader), BKB/BKR/PIK-R/M/BKL/ UPPKS)

g) Tersedianya Grand Design Pembangunan Kuantitas Penduduk yang memuat profil dan proyeksi kependudukan.

3) Capaian Program (40%) :

a) TFR

b) CPR

c) Unmet Need

d) Jumlah Peserta KB Baru MKJP terhadap KKP

e) Jumlah Peserta KB Baru Non MKJP terhadap KKP

f) ASFR 15-19 th

(sumber data : Susenas tahun sebelumnya)

d. **Persyaratan MKK bagi Ketua TP PKK**

1) **Syarat Administrasi**

a) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan (melampirkan SK Pengangkatan);

b) Daftar Riwayat Hidup;

c) Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;

d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

e) Melampirkan Surat Rekomendasi dari :

- Ketua TP PKK Provinsi bagi Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota
- Ketua TP PKK Pusat bagi Ketua TP PKK Provinsi (diurus oleh Tim Pusat).

f) Profil calon penerima yang berisi data dan informasi yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam program KKBPK (sesuai indikator penilaian dalam Lampiran 3C) sebanyak 2 (dua) rangkap asli untuk tiap calon;

2) **Dukungan Komitmen**

a) Jumlah anak;

b) Kesertaan ber-KB (melampirkan fotokopi kartu KB atau surat keterangan ber-KB dari dokter/ bidan pemerintah/swasta);

c) Dukungan dalam pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan Dasa Wisma;

d) Dukungan terhadap pelaksanaan program KKBPK;

e) Dukungan terhadap pelaksanaan Kesrak PKK KB-Kesehatan.

3) **Prestasi**

a) Melampirkan fotokopi penghargaan/sertifikat/piagam yang diperoleh terkait dengan BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS/UP2PKK, Kesrak PKK, Posyandu, dan PHBS;

b) Data pendukung/dokumentasi atas kiprahnya dalam bidang KKBPK (foto kegiatan, vcd, narasi/artikel, dll)

e. Wira Karya Kencana (WKK)/ Dharma Karya Kencana (DKK)/Cipta Karya Kencana (CKK)

1) **Syarat Administrasi WKK/DKK/CKK**

a) Daftar riwayat hidup;

b) Pas foto 4x6 (2 lembar);

c) Surat rekomendasi dari Bupati/Walikota;

d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

e) Profil calon penerima yang berisi data dan informasi yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam program KKBPK (sesuai lampiran 3 D,E,F) sebanyak 2 (dua) rangkap asli untuk tiap calon.

2) **Dukungan komitmen/prestasi**

a) **Wira Karya Kencana (WKK) bagi profesi bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)**

1) Jumlah anak;

2) Kesertaan ber-KB (melampirkan fotokopi kartu KB atau surat keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah/swasta;

3) Menjadi narasumber bidang kependudukan/keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga di

forum internasional/nasional dalam 2 tahun terakhir (melampirkan fotokopi undangan, foto kegiatan, dll);

4) Melampirkan fotokopi tulisan/artikel dalam bidang kependudukan;
5) Bukti kegiatan pelayanan KB yang dilakukan (melampirkan foto kegiatan, dokumen yang terkait, dll);
6) Penggerak/Pembina dalam bidang pembangunan keluarga di wilayahnya (BKB, BKR, BKL) minimal dalam 2 tahun terakhir;
7) Melampirkan fotokopi sertifikat/piagam/penghargaan yang pernah diterima dalam bidang kependudukan/keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pembangunan keluarga;
8) Data pendukung/dokumentasi atas kiprah dan prestasinya dalam bidang KKBPK (narasi/foto kegiatan/vcd, dll).

b) Dharma Karya Kencana (DKK)

1) Jumlah Anak;
2) Kesertaan ber-KB (melampirkan fotokopi kartu KB atau surat keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah/swasta;
3) Memberikan dukungan operasional (sarana/anggaran dan atau tenaga) terhadap program KKBPK (melampirkan foto dukungan/kegiatan, dokumen yang terkait);
4) Melampirkan fotokopi Sertifikat/Piagam/Penghargaan yang diterima dalam bidang KKBPK;

5) Data pendukung/dokumentasi atas kiprah dan prestasinya dalam bidang KKBPK (narasi/foto kegiatan/vcd, dll).

c) Cipta Karya Kencana (CKK)

1) Jumlah Anak;
2) Kesertaan ber-KB, yang dibuktikan dengan kartu KB dari tenaga/fasilitas kesehatan/ petugas yang berwenang;
3) Menghasilkan karya cipta/konsep kreasi yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Program KKBPK (melampirkan foto/dokumen terkait karyanya) ;
4) Melampirkan fotokopi piagam/sertifikat/ penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK;
5) Data pendukung/dokumentasi atas prestasi dan karyanya dalam bidang KKBPK (narasi/ foto kegiatan/vcd, dll).

Catatan :

- Penerima penghargaan MKK, WKK, DKK dan CKK tidak dapat diusulkan mendapat penghargaan yang sama untuk kedua kalinya.
- Kepala OPD PPKB Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat diusulkan mendapatkan penghargaan MKK, WKK, DKK, dan CKK karena itu merupakan tugas pokok dan fungsi.

2. Penilaian

a. Tahapan Pelaksanaan

1) Pembentukan Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN untuk Tim Pusat, Surat Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi

untuk Tim Provinsi, dan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota untuk Tim Kabupaten dan Kota;

2) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi nama-nama calon penerima yang layak memperoleh Tanda Kehormatan dan Penghargaan di wilayahnya masing-masing sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk tiap jenis penghargaan;
3) Tim Kabupaten/Kota menyusun dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, kemudian mengirimkan dokumen/berkas lengkap (dibuat untuk masing-masing calon) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah ditandatangani seluruh anggota Tim Teknis Kabupaten/Kota ke Tim Teknis Penilai Provinsi (disatukan dalam satu berkas yang disegel dan distempel resmi);
4) Tim Teknis Penilai Provinsi melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan yang diterima sesuai dengan formulir checklist kelengkapan berkas (Terlampir);
5) Tim Teknis Penilai Provinsi melakukan penilaian berdasarkan indikator dan bobot penilaian yang ada dalam lampiran 3 dengan ketentuan bahwa nama-nama calon penerima penghargaan yang dinyatakan lulus dan layak diusulkan menerima tanda kehormatan dan penghargaan adalah yang melampaui kualifikasi yang telah ditetapkan (minimal bernilai baik);
6) Hasil penilaian oleh Tim Teknis Penilai Provinsi dituangkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Penilaian yang dibuat dalam urutan mulai dari yang tertinggi;

7) Tim Penilai Provinsi membuat Berita Acara Hasil Penilaian (BAHP) dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Teknis Penilai Provinsi;
8) Selanjutnya, Tim Teknis Penilai Provinsi mengirimkan dokumen usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan (1 calon 1 dokumen), Berita Acara Hasil Penilaian, beserta formulir checklist kelengkapan berkas (sesuai lampiran 5) yang telah ditandatangani Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi yang telah disatukan dalam satu berkas yang disegel dan distempel resmi ke Tim Teknis Pusat;
9) Tim Teknis Pusat hanya menerima dan memverifikasi dokumen yang dikirim oleh Tim Teknis Penilai Provinsi;
10) Pengiriman formulir tersebut dapat dilakukan melalui PT. Pos/jasa pengiriman lainnya, yang ditujukan kepada Kepala BKKBN c.q. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga BKKBN Pusat.
11) Tim Teknis Pusat melakukan verifikasi dan validasi data capaian program terhadap dokumen calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan hasil penilaian Tim Teknis Penilai Provinsi;
12) Khusus untuk calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan (SP) dan Satyalancana Wira Karya (SWK), Kepala BKKBN akan memintakan klarifikasi dan rekomendasi kepada Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung.
13) Tim Teknis Pusat membuat Berita Acara (BA) hasil verifikasi dan validasi data usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan.

b. **Bobot Penilaian**

1) **Penilaian SP dan MKK bagi Gubernur, Bupati dan Walikota**

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	NILAI
1	**Syarat Administrasi**	
2	**Dukungan Politik/Komitmen**	
	a. Jumlah anak	25-100
	b. Bentuk Kelembagaan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai UU No. 23/2014 dan PP No. 18/2016 (utuh/merger)	25-100
	c. Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaan Kampung KB	25-100
	d. Persentase dukungan APBD Operasional Program KKBPK terhadap APBD Total dalam 2 tahun terakhir (Diluar DAK)	25-100
	e. Terlaksananya mekanisme Operasional Lini Lapangan (Rakor desa, Staff Meeting, Rakor Kecamatan, Lokmin setiap bulannya)	50-100
	f. Dukungan operasional di lini lapangan dalam pembinaan KB/KS (PPKBD/ Sub PPKBD/Kader), BKB/BKR/PIK-R/M/BKL/UPPKS)	25-100
	g. Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kuantitas Penduduk (GDPK) yang memuat profil dan proyeksi kependudukan	25-100
3	**Aspek Prestasi Capaian Program**	
	a. TFR	25-100
	b. CPR	25-100
	c. Unmet Need	25-100
	d. Jumlah Peserta KB Baru MKJP terhadap KKP	25-100
	e. Jumlah Peserta KB Baru Non MKJP terhadap KKP	25-100
	f. ASFR (15-19 tahun)	25-100

2) Penilaian SWK

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	NILAI
1	**Syarat Administrasi**	
2	**Dukungan Komitmen/Prestasi**	
	a. Kesertaan ber-KB	10-100
	b. Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang Kependudukan/KB/Pembangunan Keluarga	25-100
	c. Menjadi narasumber dalam bidang KKBPK di forum internasional/nasional dalam 2 tahun terakhir	50-100
	d. Keaktifan dalam organisasi tingkat nasional/daerah	25-100
	e. Tulisan/artikel dalam bidang KKBPK yang dipublikasikan di media cetak	50-100
	f. Data-data pendukung/ dokumentasi atas prestasi dan kiprahnya dalam bidang KKBPK	25-100

3) Penilaian MKK bagi Ketua TP PKK

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	NILAI
1	**Syarat Administrasi**	
2	**Dukungan Komitmen/Prestasi**	
	a. Jumlah anak	25-100
	b. Kesertaan ber-KB	10-100
	c. Dukungan Ketua PKK dalam pembentukan pelaksanaan dan pembinaan Dasa Wisma	50-100
	d. Dukungan Ketua TP PKK terhadap pelaksanaan operasional program KKBPK	50-100
	e. Dukungan Ketua TP PKK dalam pelaksanaan Kesrak PKK KB Kes	50-100
3	**Prestasi/penghargaan yang diperoleh** (BKB, BKR, BKL, PIK R/M, UPPKS/UP2 PKK, Kesrak PKK KB Kes, Posyandu, PHBS)	25-100

4) **Penilaian WKK bagi profesi yang mendukung bidang KKBPK**

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	NILAI
1	**Syarat Administrasi**	
2	**Dukungan Komitmen**	
	a. Jumlah Anak	25-100
	b. Kesertaan ber-KB	10-100
	c. Menjadi narasumber dalam bidang kependudukan di forum internasional/nasional dalam 2 tahun terakhir	25-100
	d. Tulisan/artikel/karya ilmiah di bidang kependudukan yang dipublikasikan	50-100
	e. Menjadi narasumber dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di forum internasional/nasional dalam 2 tahun terakhir	25-100
	f. Menjadi narasumber dalam bidang pembangunan keluarga di forum internasional/nasional dalam 2 tahun terakhir	25-100
	g. Kegiatan dalam bidang KB yang dilakukan (baksos)	50-100
	h. Penggerak/Pembina bidang pembangunan keluarga di wilayahnya (min. 2 tahun terakhir)	25-100
	i. Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang kependudukan	25-100
	j. Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KB	25-100
	k. Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang pembangunan keluarga (Tribina)	25-100
	l. Data-data pendukung/ dokumentasi atas prestasi dan kiprahnya dalam bidang KKBPK	50-100

5) **Penilaian DKK**

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	NILAI
1	**Syarat Administrasi**	
2	**Dukungan Komitmen/Prestasi**	
	a. Jumlah Anak	25-100
	b. Kesertaan ber-KB	10-100
	c. Dukungan operasional (sarana/anggaran dan atau tenaga) terhadap program KKBPK dalam 2 tahun terakhir	25-100
	d. Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK	25-100
	e. Data-data Pendukung/ dokumentasi atas prestasi dan kiprahnya dalam bidang KKBPK	25-100

6) **Penilaian CKK**

NO.	INDIKATOR YANG DINILAI	NILAI
1	**Syarat Administrasi**	
2	**Aspek Dukungan Komitmen**	
	a. Jumlah Anak	25-100
	b. Kesertaan ber-KB	10-100
	c. Hasil karya cipta/konsep kreatif yang mendukung program KKBPK	50-100
	d. Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK	25-100
	e. Data-data Pendukung/ dokumentasi atas prestasi dan karyanya	25-100

c. Cara Penilaian:

1) Masing-masing indikator diberikan nilai, dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 100.
2) Nilai Akhir adalah jumlah dari nilai dikali bobot penilaian masing-masing indikator.
3) Untuk SP dan MKK, aspek dukungan komitmen memiliki bobot 60% dan aspek prestasi capaian program 40%.

d. **Kualifikasi Hasil, sbb:**

1) Amat Baik : 90,1 - 100
2) Baik : 70,1 - 90
3) Cukup : 50,1 - 70
4) Kurang : ≤ 50

C. PENETAPAN CALON PENERIMA

1. **Pengajuan dan Penetapan nama-nama penerima penghargaan**

a. Setelah Tim Teknis Penilai Provinsi melakukan verifikasi/validasi dan penilaian, nama-nama calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan diusulkan kepada Tim Teknis Pusat.

b. Tim Teknis Pusat melakukan verifikasi/validasi data capaian program terhadap calon yang diusulkan Tim Teknis Penilai Provinsi untuk kemudian diajukan nama-nama yang lulus kepada Kepala BKKBN melalui Tim Pengarah untuk memperoleh persetujuan.

c. Nama-nama penerima Tanda Penghargaan MKK, WKK, DKK, dan CKK yang telah disetujui oleh Kepala BKKBN, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKKBN.

d. Khusus untuk Tanda Kehormatan SP dan SWK, setelah disetujui oleh Kepala BKKBN, kemudian dimintakan klarifikasi kepada BIN, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.

e. Kepala BKKBN mengusulkan nama-nama penerima penghargaan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

2. **Penyematan Penghargaan**

a. Tanda Penghargaan MKK, WKK, DKK dan CKK akan diserahkan oleh Kepala BKKBN sedangkan untuk Tanda

Kehormatan SP dan SWK akan diserahkan oleh Presiden RI dan atau yang diberikan mandat atas nama Presiden RI.

b. Penyerahan Tanda Kehormatan SP dan SWK dilakukan pada puncak acara Peringatan Hari Keluarga Nasional. Sedangkan Tanda Penghargaan MKK, WKK, DKK, dan CKK diserahkan pada Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional atau pada momentum tertentu, baik yang berskala nasional maupun lokal di daerah.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan, dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian tanda kehormatan dan penghargaan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, penyematan dan pemantauan paska pemberian tanda kehormatan dan penghargaan.

a. BKKBN Pusat

1) Tim Pengarah memberikan pertimbangan kepada Tim Teknis dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan, dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada penyematan tanda kehormatan dan penghargaan.

2) Tim Teknis melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyematan peghargaan agar tetap berjalan sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan, serta pemantauan ke kabupaten/ kota paska penerimaan tanda kehormatan dan penghargaan.

b. Perwakilan BKKBN Provinsi

1) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai penanggung jawab Tim Teknis Penilai Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian tanda kehormatan dan penghargaan, dari tahap persiapan, penilaian, sampai pada penetapan usulan calon penerima tanda kehormatan dan penghargaan.
2) Tim Teknis Penilai Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan verifikasi, validasi dan penilaian usulan calon penerima tanda kehormatan dan penghargaan, serta pemantauan ke kabupaten/ kota paska penerimaan tanda kehormatan dan penghargaan

2. Evaluasi

a. BKKBN Pusat

Tim Teknis Pusat melaksanakan evaluasi 1 (satu) kali dalam satu tahun terhadap dampak kegiatan pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan terhadap Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

b. Perwakilan BKKBN Provinsi

Ketua Tim Penilai Provinsi melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam setahun terhadap kegiatan pemberian tanda kehormatan dan tanda penghargaan mulai dari pengusulan ke BKKBN Pusat sampai dengan penyematan penghargaan, pada peringatan Hari Keluarga maupun momentum tertentu baik berskala nasional maupun lokal di daerah.

c. Pengecekan Lapangan

Tim Teknis Pusat dapat melakukan uji petik langsung ke lapangan untuk meneliti tingkat kebenaran data dan informasi serta data pendukung lain yang sudah disampaikan.

PENUTUP

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja yang telah berkomitmen dan mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayahnya. Dan ini merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan percepatan keberhasilan tujuan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan diharapkan menjadi acuan bagi para pelaksana di setiap tingkatan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, baik dalam tahap persiapan, penilaian, sampai penetapan calon penerima penghargaan berdasarkan persyaratan, kriteria dan indicator yang telah ditetapkan. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari pedoman yang sebelumnya, disesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan BKKBN. Dengan diterbitkannya Buku Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan ini, proses pelaksanaan kegiatan pemberian Tanda Kehormatan dan Penghargaan kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja dapat terlaksana dengan optimal, tepat cara dan tepat sasaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY

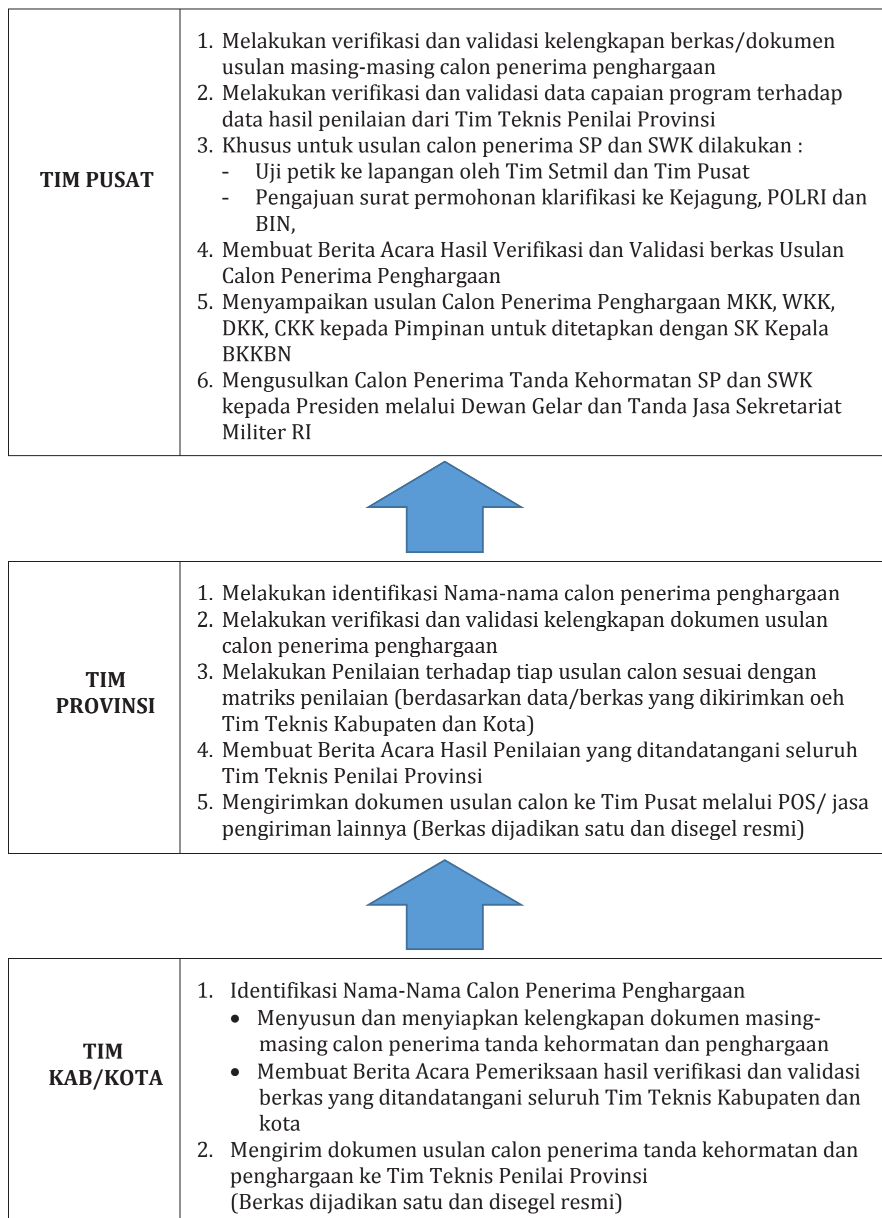
LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	**:**	**Mekanisme Kerja Tim Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang KKBPK**
Lampiran 2	**:**	**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Tim Pusat/Provinsi/Kab/Kota**
Lampiran 3	**:**	**Matriks Penilaian SP, SWK, MKK**
Lampiran 4	**:**	**Matriks Rekapitulasi Penilaian**
Lampiran 5	**:**	**Formulir Checklist Kelengkapan Berkas Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan Bidang KKBPK**
Lampiran 6	**:**	**Gambar dan Deskripsi Lencana Tanda Kehormatan dan Penghargaan**
Lampiran 7	**:**	**Sistematika Penulisan Profil**

LAMPIRAN 1

MEKANISME KERJA TIM PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM KEGIATAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KKBPK



LAMPIRAN 2

JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN TIM PUSAT/PROVINSI/KAB/KOTA

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu
1	**Tahapan Persiapan**	
	a. Sosialisasi Pedoman Pemberian Penghargaan oleh Pusat	M. I Februari
	b. Sosialisasi ke Kabupaten dan Kota oleh Tim Provinsi	M. I Februari
2	**Tahap Pelaksanaan**	
	a. Pengiriman dokumen asli usulan nama-nama Calon Penerima Penghargaan dari Tim Teknis Kabupaten dan Kota ke Tim Teknis Penilai Provinsi	M. I-IV Februari
	b. Verifikasi, validasi dan pengiriman dokumen asli masing-masing usulan calon penerima MKK, DKK, WKK dan CKK oleh Tim Teknis Provinsi ke Tim Pusat	M. I-IV Maret
	c. Pengiriman dokumen asli usulan calon penerima Tanda Kehormatan SP dan SWK ke Tim Teknis Pusat c.q. Ditbinhub	**M. II Maret**
	d. Tim Teknis Pusat melakukan Verifikasi dan validasi dokumen masing-masing usulan calon penerima SP dan SWK	M. II-III Maret
	e. Pengajuan surat permohonan klarifikasi kepada BIN, Kejaksaan Agung, Polri, khusus usulan nama-nama calon penerima Tanda Kehormatan SP (bagi Gubernur, Bupati dan Walikota) dan SWK (bagi perorangan)	M. III Maret
	f. Pengajuan usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan SP dan SWK dari Kepala BKKBN ke Presiden RI melalui Sekretariat Militer RI	M. IV Maret
	g. Tim Pusat melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan nama calon penerima MKK, WKK, DKK, dan CKK	M. I-IV April
	h. Pengajuan usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan SP dan SWK dari Kepala BKKBN ke Presiden RI melalui Sekretariat Militer RI	M. I Mei
	i. Permintaan Persetujuan dari Ketua Umum TP. PKK Pusat, untuk calon penerima penghargaan MKK bagi Ketua TP PKK Provinsi	M. I Mei
	j. Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil verifikasi dan validasi data capaian program masing-masing usulan calon penerima Tanda Kehormatan dan Penghargaan kepada Penanggung Jawab	M. I-II Mei
	k. Penilaian dan peninjauan lapangan oleh Tim Sekretariat Militer RI dengan didampingi oleh Tim Teknis Pusat	M. I-IV Mei
	l. Penetapan Usulan Penerima Penghargaan MKK, WKK, CKK dan DKK oleh Tim Teknis Pusat, untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Pimpinan	M. III Mei
	m. Penerbitan SK Kepala BKKBN untuk penetapan penerima Penghargaan MKK, WKK, DKK dan CKK	M. IV Mei
	n. Penetapan Penerima Tanda Kehormatan SP dan SWK oleh Presiden	M. III Juni*
3	**Penyematan Tanda Penghargaan**	
	a. Pelaksanaan Hari Keluarga	M. II Juli
	b. Momentum Nasional dan Lokal di daerah	Disesuaikan dengan momentum yang ada

*) Tentative menunggu Persetujuan dari Presiden Republik Indonesia

LAMPIRAN 3A

MATRIK PENILAIAN TANDA KEHORMATAN SP DAN MKK BAGI GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA .... NAMA………………………………………………………

No	Indikator yang dinilai	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= ((3) x (4))
1.	**Syarat Administrasi**			
2.	**Aspek Komitmen/Dukungan Politis***	**Nilai**	**100%**	
a.	**Jumlah Anak**	**25-100**	**10%**	
	- ≤ 2 anak	100		
	- 3 anak	50		
	- > 3 anak	25		
b.	**Bentuk kelembagaan yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan KB (utuh/merger)**	**25-100**	**15%**	
	- Dinas utuh (Dinas Dalduk dan KB)	100		
	- Merger 2 (Dinas Dalduk, KB dan urusan lainnya......)	50		
	- Merger ≥ 3	25		
c.	**Jumlah lintas sektor yang terlibat dalam penggarapan Kampung KB** (PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, PMD, dll)	**25-100**	**15 %**	
	- ≥ 7	100		
	- 5 – 6	75		
	- 3 – 4	50		
	- 1 – 2	25		
d.	**Persentase dukungan APBD Operasional Program KKBPK terhadap APBD total 2 tahun terakhir (di luar DAK)**	**25-100**	**20%**	
	- 4 % dari APBD	100		
	- 3 % dari APBD	75		
	- 2 % dari APBD	50		
	- 1 % dari APBD	25		
e.	**Terlaksananya Mekanisme Operasional LinLap program KKBPK (setiap bulannya)**	**50-100**	**10%**	
	a. Staff meeting, rakor desa, rakor kecamatan, dan lokmin	100		
	b. Staff meeting, rakor desa, dan rakor kecamatan	75		
	c. Staff meeting/rakor desa/rakor kecamatan (minimal satu)	50		
f.	**Dukungan operasional dari dana APBD di lini lapangan dalam Pembinaan KB/KS (PKB/PLKB, IMP PPKBD/ Sub PPKBD/Kader, BKB/BKR/PIK R/M /BKL/UPPKS)**	**25-100**	**15%**	
	a. Dukungan operasional lengkap (PKB/PLKB, IMP PPKBD/ Sub PPKBD, 5 Poktan)	100		
	b. Dukungan operasional lengkap (PKB/PLKB, IMP PPKBD/ Sub PPKBD, 4 Poktan)	75		
	c. Dukungan operasional lengkap (PKB/PLKB, IMP PPKBD/Sub PPKBD, 3 Poktan)	50		
	d. Dukungan operasional lengkap (PKB/PLKB, IMP PPKBD/Sub PPKBD, 2 Poktan)	25		
g.	**Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kuantitas Penduduk (GDPK) yang memuat profil dan proyeksi kependudukan**	**25-100**	**15%**	
	- Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Integrasi GDPK	100		
	- Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota	75		
	- SK Gubernur/Bupati/Walikota	50		
	- Dokumen GDPK	25		
	JUMLAH NILAI A			
3.	**Aspek Prestasi Capaian Program****	**Nilai**	**100 %**	**Nilai Akhir**
a.	**Jumlah Peserta KB Baru MKJP (MOP/MOW/Implant/IUD)**	**25-100**	**25%**	

	- 91 s/d 100 % pencapaian terhadap KKP	100		
	- 76 s/d 90% pencapaian terhadap KKP	75		
	- 51 s/d 75 % pencapaian terhadap KKP	50		
	- ≤ 50 % terhadap KKP	25		
b.	**Jumlah Peserta KB Baru Non MKJP (Suntik/Pil/ Kondom)**	**25-100**	**10%**	
	- 91 s/d 100 % pencapaian terhadap KKP	100		
	- 76 s/d 90% pencapaian terhadap KKP	75		
	- 51 s/d 75 % pencapaian terhadap KKP	50		
	- ≤ 50 % terhadap KKP	25		
c.	**Unmet Need (PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani)**	**25-100**	**15%**	
	- < 8,6	100		
	- 8,6 – 10,27	50		
	- > 10,27	25		
d.	**Contraceptive Prevalence Rate**	**25-100**	**20%**	
	- > 61,78	100		
	- 60,9 – 61,78	50		
	- < 60,9	25		
e.	**TFR**	**25-100**	**15%**	
	- < 2,26	100		
	- 2,26 – 2,4	50		
	- > 2,4	25		
f.	**ASFR (15-19 tahun) per 1000 kelahiran**	**25-100**	**15 %**	
	- < 25	100		
	- 25 – 35	50		
	- > 35	25		
JUMLAH NILAI B				
JUMLAH NILAI TOTAL: (A x 60 %) + (B x 40 %)				

Keterangan:
* Bobot Penilaian Aspek Dukungan Komitmen/Politik 60%
**Bobot Penilaian Aspek Prestasi Capaian Program 40%

Jumlah Nilai Total adalah :
(JUMLAH NILAI A x 60 %) + (JUMLAH NILAI B x 40 %)

Kualifikasi Penilaian:
1. Amat baik : 90,1 - 100
2. Baik : 70,1 - 90
3. Cukup : 50,1 - 70

..............................., ... 20...

TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		**Ketua**	**1**	
2		**Sekretaris**		**2**
3		**Anggota**	**3**	
4		**Anggota**		**4**
5		**Anggota**	**5**	
6		**Anggota**		**6**

LAMPIRAN 3B

MATRIK PENILAIAN TANDA KEHORMATAN SWK BAGI PERORANGAN
NAMA..PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……………………………………………

No	Indikator yang dinilai	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= ((3) x (4))
1.	**Syarat Administrasi**			
2.	**Dukungan Komitmen/Politis***	**Nilai**	**100%**	
a.	**Kesertaan ber-KB**	**10-100**	**15%**	
	- MOP/MOW	100		
	- IUD/Implan	75		
	- Suntik	25		
	- Pil/Kondom	10		
b.	**Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang Kependudukan/KB/Pembangunan Keluarga**	**25-100**	**20%**	
	- Penghargaan untuk ketiga bidang	100		
	- Penghargaan untuk dua bidang	50		
	- Penghargaan untuk satu bidang	25		
c.	**Menjadi narasumber dalam bidang KKBPK (2 tahun terakhir)**	**50-100**	**20%**	
	a. Di forum internasional	100		
	b. Di forum nasional	50		
	c. Di forum provinsi	25		
d.	**Keaktifan dalam organisasi tingkat Nasional/Daerah**	**25-100**	**15%**	
	- Ketua	100		
	- Sekretaris/Bendahara	75		
	- Kepala Bidang/Departemen/dll	50		
	- Anggota	25		
e.	**Tulisan/Artikel dalam bidang KKBPK**	**50-100**	**15%**	
	- Dipublikasikan di media cetak nasional	100		
	- Dipublikasikan di media cetak lokal/daerah	50		
f.	**Data-data Pendukung (Dokumentasi atas prestasi dan karyanya dalam bidang KKBPK)**	**25-100**	**15%**	
	- Data Narasi, foto, dan VCD	100		
	- Data Narasi. Foto	50		
	- Narasi	25		
	JUMLAH NILAI TOTAL			

Kualifikasi Penilaian:

1. Amat baik : 90,1 - 100
2. Baik : 70,1 - 90
3. Cukup : 50,1 - 70

............................., ... **20...**

TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		**Ketua**	**1**	
2		**Sekretaris**		**2**
3		**Anggota**	**3**	
4		**Anggota**		**4**
5		**Anggota**	**5**	
6		**Anggota**		**6**

LAMPIRAN 3C

MATRIK PENILAIAN TANDA PENGHARGAAN MKK BAGI KETUA TP PKK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : .... NAMA……………………………..

No	Indikator yang dinilai	Nilai	Bobot Nilai	Nilai akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) x (4))
1.	**Syarat Administrasi**			
2.	**Aspek Dukungan Komitmen**	**Nilai**	**100 %**	
a.	**Jumlah anak**	**25-100**	**25%**	
	- ≤ 2 anak	100		
	- 3 anak	50		
	- > 3 anak	25		
b.	**Kesertaan ber KB**	**10-100**	**20%**	
	- MOW/MOP	100		
	- IUD/Implant	75		
	- Suntik	25		
	- Pil/kondom	10		
c.	**Dukungan Ketua TP PKK dalam pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan Dasa Wisma**	**25-100**	**15%**	
	- SK Gubernur/Bupati/Walikota	100		
	- SK Ketua TP PKK	50		
	- Surat Edaran Ketua TP PKK	25		
d.	**Dukungan Ketua TP PKK dalam pelaksanaan operasional program KKBPK dalam bentuk SK, Edaran, dll.**	**25-100**	**20%**	
	- SK Gubernur/Bupati/Walikota	100		
	- SK Ketua TP PKK	50		
	- Surat Edaran Ketua TP PKK	25		
e.	**Dukungan Ketua TP PKK dalam pelaksanaan Kesrak PKK KB Kes, dengan SK, Edaran.**	**25-100**	**20%**	
	- SK Gubernur/Bupati/Walikota	100		
	- SK Ketua TP PKK	50		
	- Surat Edaran Ketua TP PKK	25		
JUMLAH NILAI A				
3.	**Prestasi/Penghargaan yang diperoleh**	**Nilai**	**100 %**	
a.	**BKB**	**25 - 100**	**15%**	
	- Juara I s/d III Tingkat Nasional	100		
	- Juara I s/d III Tingkat Provinsi	75		
	- Juara I s/d III Tingkat Kab/Kota	50		
	- Juara Harapan Tk. Nasional/ Provinsi	25		
b.	**BKR**	**25 - 100**	**10%**	
	- Juara I s/d III Tingkat Nasional	100		
	- Juara I s/d III Tingkat Provinsi	75		
	- Juara I s/d III Tingkat Kab/Kota	50		
	- Juara Harapan T.Nasional/Provinsi	25		
c.	**BKL**	**25 – 100**	**10%**	
	- Juara I s/d III Tingkat Nasional	100		
	- Juara I s/d III Tingkat Provinsi	75		
	- Juara I s/d III Tingkat Kab/Kota	50		
	- Juara Harapan Tk.Nasional/ Provinsi	25		
d.	**Kelompok UPPKS/UP2 PKK**	**25 – 100**	**15%**	
	- Juara I s/d III Tingkat Nasional	100		
	- Juara I s/d III Tingkat Provinsi	75		
	- Juara I s/d III Tingkat Kab/Kota	50		
	- Juara Harapan Tk.Nasional/ Provinsi	25		
e.	**PIK Remaja/Mahasiswa**	**25 – 100**	**10%**	
	- Juara I s/d III Tingkat Nasional	100		
	- Juara I s/d III Tingkat Provinsi	75		

	- Juara I s/d III Tingkat Kab/Kota	50		
	- Juara Harapan Tk.Nasional/ Provinsi	25		
f.	**Kesatuan Gerak PKK KB Kes**	**25 – 100**	**15%**	
	Juara I s/d III. Pakarti Utama Nasional	100		
	- Juara I s/d III Pakarti Madya Nasional	75		
	Juara Provinsi Pakarti Utama	50		
	- Juara Provinsi Pakarti Madya	25		
g.	**Posyandu**	**25 – 100**	**15%**	
	Juara I s/d III. Pakarti Utama Nasional	100		
	- Juara I s/d III Pakarti Madya Nasional	75		
	Juara Provinsi Pakarti Utama	50		
	- Juara Provinsi Pakarti Madya	25		
h.	**PHBS**	**25 – 100**	**10%**	
	Juara I s/d III. Pakarti Utama Nasional	100		
	- Juara I s/d III Pakarti Madya Nasional	75		
	Juara Provinsi Pakarti Utama	50		
	- Juara Provinsi Pakarti Madya	25		
JUMLAH NILAI B				
JUMLAH NILAI TOTAL: (A x 60 %) + (B x 40 %)				

Keterangan:
* Bobot Penilaian Aspek Dukungan Komitmen **60 %**
Bobot Penilaian Aspek Prestasi **40 %

Jumlah Nilai Total adalah :
(JUMLAH NILAI A x 60 %) + (JUMLAH NILAI B x 40 %)

Kualifikasi Penilaian:
1. Amat baik : 90,1 - 100
2. Baik : 70,1 - 90
3. Cukup : 50,1 - 70

..............................., ... 20...

TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		**Ketua**	**1**	
2		**Sekretaris**		**2**
3		**Anggota**	**3**	
4		**Anggota**		**4**
5		**Anggota**	**5**	
6		**Anggota**		**6**
7		**Anggota**	**7**	

LAMPIRAN 3D

PENILAIAN TANDA PENGHARGAAN WKK BAGI PROFESI BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)
NAMA : .... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Indikator yang dinilai	Nilai	Bobot Nilai	Nilai akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= ((3)x(4))
1.	**Syarat Administrasi**			
2.	**Aspek Dukungan Komitmen/Prestasi**		100 %	
a.	**Jumlah anak**	**25–100**	**10%**	
	- ≤ 2 anak	100		
	- 3 anak	50		
	- > 3 anak	25		
b.	**Kesertaan ber KB**	**10–100**	**10%**	
	- MOW/MOP	100		
	- IUD/Implant	75		
	- Suntik	25		
	- Pil/kondom	10		
c.	**Menjadi narasumber dalam bidang Kependudukan (2 tahun terakhir)**	**25-100**	**8%**	
	- Di forum internasional	100		
	- Di forum nasional	50		
	- Di forum provinsi	25		
d.	**Tulisan/Artikel dalam bidang Kependudukan**	**50-100**	**8%**	
	- Dipublikasikan di media cetak nasional	100		
	- Dipublikasikan di media cetak lokal/daerah	50		
e.	**Menjadi narasumber bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (2 tahun terakhir)**	**25-100**	**8%**	
	- Di forum internasional	100		
	- Di forum nasional	50		
	- Di forum provinsi	25		
f.	**Menjadi narasumber bidang Pembangunan Keluarga (2 tahun terakhir)**	**25-100**	**8%**	
	- Di forum internasional	100		
	- Di forum nasional	50		
	- Di forum provinsi	25		
g.	**Kegiatan pelayanan KB yang dilakukan (baksos)**	**50-100**	**8%**	
	- Pelayanan KB MKJP/Non MKJP Tingkat Provinsi	100		
	- Pelayanan KB MKJP/Non MKJP Tk Kab/kota	50		
h.	**Penggerak/pembina bidang Pembangunan Keluarga di wilayahnya (minimal 2 tahun terakhir)**	**25-100**	**8%**	
	- Tribina (BKB, BKR, BKL) yang aktif	100		
	- 2 kegiatan yang aktif	50		
	- 1 kegiatan yang aktif	25		
i.	**Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang Kependudukan**	**25-100**	**8 %**	
	- Penghargaan Tingkat Nasional	100		
	- Penghargaan Tingkat Provinsi	50		
	- Penghargaan Tingkat Kab/kota	25		
j.	**Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang pelayanan KB**	**25-100**	**8%**	
	- Penghargaan Tingkat Nasional	100		
	- Penghargaan Tingkat Provinsi	50		
	- Penghargaan Tingkat Kab/kota	25		
k.	**Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang pembangunan keluarga (Tribina)**	**25-100**	**8%**	
	- Penghargaan Tingkat Nasional	100		
	- Penghargaan Tingkat Provinsi	50		
	- Penghargaan Tingkat Kab/kota	25		

l.	**Data-data Pendukung (Dokumentasi atas kiprah dan prestasinya dalam bidang KKBPK)**	**50-100**	**8%**	
	- Data Narasi, foto, dan VCD	100		
	- Data Narasi. Foto	50		
	- Narasi	25		
JUMLAH NILAI TOTAL				

Kualifikasi Penilaian:

1. Amat baik : 90,1 - 100
2. Baik : 70,1 - 90
3. Cukup : 50,1 - 70

.............................., ... 20...

TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		**Ketua**	**1**	
2		**Sekretaris**		**2**
3		**Anggota**	**3**	
4		**Anggota**		**4**
5		**Anggota**	**5**	
6		**Anggota**		**6**
7		**Anggota**	**7**	

LAMPIRAN 3E

PENILAIAN TANDA PENGHARGAAN DKK
NAMA : .... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Indikator yang dinilai	Nilai	Bobot Nilai	Nilai akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= ((3)x(4))
1.	Syarat Administrasi			
2.	Aspek Dukungan Komitmen/Prestasi		100 %	
a.	**Jumlah anak**	**25-100**	**20%**	
	- ≤ 2 anak	100		
	- 3 anak	50		
	- > 3 anak	25		
b.	**Kesertaan ber KB**	**10-100**	**20%**	
	- MOW/MOP	100		
	- IUD/Implant	75		
	- Suntik	25		
	- Pil/kondom	10		
c.	**Dukungan/bantuan Operasional (sarana, anggaran, tenaga) dalam program KKBPK (2 tahun terakhir)**	**25-100**	**30%**	
	- 3 dukungan (Anggaran, Sarana Tenaga)	100		
	- 2 dukungan (Anggaran/sarana, tenaga)	50		
	- 1 dukungan (Tenaga)	25		
d.	**Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK**	**25-100**	**15%**	
	- Penghargaan Tingkat Nasional	100		
	- Penghargaan tingkat provinsi	50		
	- Penghargaan tingkat kab/kota	25		
e.	**Data-data Pendukung(Dokumentasi atas kiprah dan prestasinya dalam bidang KKBPK)**	**25-100**	**15%**	
	- Data Narasi, foto, dan VCD	100		
	- Data Narasi. foto	50		
	- Narasi	25		
	JUMLAH NILAI TOTAL			

Kualifikasi Penilaian:
1. Amat baik : 90,1 - 100
2. Baik : 70,1 - 90
3. Cukup : 50,1 - 70

..............................., ... 20...

TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		Ketua	1	
2		Sekretaris		2
3		Anggota	3	
4		Anggota		4
5		Anggota	5	
6		Anggota		6
7		Anggota	7	

LAMPIRAN 3F

PENILAIAN TANDA PENGHARGAAN CKK
NAMA : .... PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Indikator yang dinilai	Nilai	Bobot Nilai	Nilai akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= ((3)x(4))
1.	**Syarat Administrasi**			
2.	**Aspek Dukungan Komitmen/Prestasi**		**100 %**	
a.	**Jumlah anak**	**25 – 100**	**20%**	
	- ≤ 2 anak	100		
	- 3 anak	50		
	- > 3 anak	25		
b.	**Kesertaan ber KB**	**10 – 100**	**20%**	
	- MOW/MOP	100		
	- IUD/Implant	75		
	- Suntik	25		
	- Pil/kondom	10		
c.	**Hasil Karya Cipta/Konsep Kreatif yang mendukung program KKBPK**	**50 -100**	**30%**	
	- Telah dipublikasikan di media nasional	100		
	- Telah dipublikasikan di media lokal	50		
d.	**Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK**	**25 -100**	**15%**	
	- Penghargaan Tingkat Nasional	100		
	- Penghargaan tingkat provinsi	50		
	- Penghargaan tingkat kab/kota	25		
e.	**Data-data Pendukung (Dokumentasi atas prestasi dan karyanya dalam bidang KKBPK)**	**25 -100**	**15%**	
	- Data Narasi, foto, dan VCD	100		
	- Data Narasi. foto	50		
	- Narasi	25		
	JUMLAH NILAI TOTAL			

Kualifikasi Penilaian:
1. Amat baik : 90,1 - 100
2. Baik : 70,1 - 90
3. Cukup : 50,1 - 70

..............................., ... 20...

TIM PENILAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1		**Ketua**	**1**	
2		**Sekretaris**		**2**
3		**Anggota**	**3**	
4		**Anggota**		**4**
5		**Anggota**	**5**	
6		**Anggota**		**6**
7		**Anggota**	**7**	

LAMPIRAN 4A

REKAPITULASI PENILAIAN USULAN CALON PENERIMA SP / MKK UNTUK GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: ....

No	Nama	Jabatan	Lama menja bat	Administrasi		Aspek Komitmen Dukungan Politis (A)								Aspek Prestasi/Penghargaan (B)							Nilai Akhir (Ax60%) +(Bx40%)
				Leng kap	Tdk	Jml Anak	Bentuk kelemba gaan	Jumlah K/L lintas sektor yg terlibat dlm kampung KB	Persentase Dukungan APBD Operasional Prog KKBPK thd APDB Total	Terlaksananya mekop LinLap prog KKBPK	Dukungan Operasional Lini Lapangan dlm pmbinaan KB/KS	Grand Design Pemba ngunan Kuantitas Pnduduk yg telah disusun	Sub Jml	Pserta KB Baru MKJP	Peserta KB Baru Non MKJP	Unmet Need	CPR	TFR	ASFR	Sub Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

……………., ……………………………20….

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Sekretaris	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.

LAMPIRAN 4B

REKAPITULASI PENILAIAN USULAN CALON PENERIMA SWK UNTUK PERORANGAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Nama	Jabatan	Lama menjabat	Administrasi		Aspek Komitmen/Dukungan Politis					
				Lengkap	Tidak	Kesertaan Ber-KB	Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK	Menjadi narasumber dalam bidang KKBPK	Keaktifan dalam organisasi tingkat nasional/daerah	Data Pendukung (Dokumentasi atas Prestasi dan Karya)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

……………., ……………………………20….

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Sekretaris	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.

LAMPIRAN 4C

REKAPITULASI PENILAIAN USULAN CALON PENERIMA MKK TP PKK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: ....

No	Nama	Jabatan	Lama menjab at	Administrasi		Aspek Dukungan Komit						Aspek Prestasi Penghargaan (B)									Nilai Akhir (Ax60%) +(Bx40%)
				Lengkap	Tdk	Jml Anak	Keserta an ber KB	Dukungan Ketua PKK dlm pembentukan pelaksanaan dan pembinaan Dasa Wisma	Dukungan Ketua TP PKK dalam pelaksanaan operasioonal prog KKBPK	Dukungan Ketua TP PKK dalam pelaksanaan Kesrak PKK KB Kes	Sub Jml	BKB	BKR	BKL	UPPKS/ UP2 PKK	PIK R/M	Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Posyan du	PHBS	Sub Jml	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

……………., …………………………..20....

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Sekretaris	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.

LAMPIRAN 4D

REKAPITULASI PENILAIAN USULAN CALON PENERIMA WKK UNTUK PROFESI YANG MENDUKUNG PROGRAM KKBPK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Nama	Jabatan	Lama menja bat	Administrasi		Aspek Dukungan Komitmen/Prestasi												
				Leng kap	Tidak	Jml Anak	Kesertaan ber-KB	Menjadi narasumber bidang kependudukan	Tulisan/ artikel dalam bidang kependu dukan	Menjadi narasumber bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Menjadi narasum ber bidang pembang unan keluarga	Kegiatan pelayanan KB yang dilakukan	Penggerak/ pembina bidang pembangu nan keluarga di wilyahnya	Pengharg aan yg pernah diterima dalam bidang kependu dukan	Pengharg aan yg pernah diterima dalam bidang pelayana n KB	Penghargaan yg pernah diterima dlm bidang pmbangunan keluarga (Tribina)	Data Pendu kung (data/ narasi/ foto/ vcd)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	

……………., …………………………..20….

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Sekretaris	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.

LAMPIRAN 4E

REKAPITULASI PENILAIAN USULAN CALON PENERIMA DKK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Nama	Jabatan	Lama menjabat	Administrasi		Aspek Dukungan Komitmen/Prestasi					
				Lengkap	Tidak	Jumlah anak	Kesertaan ber-KB	Dukungan operasional (sarana/ anggaran/ tenaga) dalam program KKBPK	Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK	Data Pendukung Lainnya (data/narasi/ foto/vcd)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

……………., ……………………………20….

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Sekretaris	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.

LAMPIRAN 4F

REKAPITULASI PENILAIAN USULAN CALON PENERIMA CKK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ....

No	Nama	Jabatan	Lama menjabat	Administrasi		Aspek Dukungan Komitmen/Prestasi					
				Lengkap	Tidak	Jumlah anak	Kesertaan ber-KB	Hasil Karya Cipta/Konsep Kreatif yang mendukung program KKBPK	Penghargaan yang pernah diterima dalam bidang KKBPK	Data Pendukung Lainnya (data/narasi/ foto/vcd)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

……………., ……………………………20….

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Sekretaris	2.
3		Anggota	3.
4		Anggota	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.

LAMPIRAN 5A

FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN CALON PENERIMA SATYALANCANA PEMBANGUNAN (SP) DAN MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) BAGI GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

NO.	BERKAS/DOKUMEN YANG HARUS ADA	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Fotokopi Piagam Penghargaan MKK yang telah diterima		
2	Fotokopi SK Pengangkatan dalam Jabatan		
3	Daftar Riwayat Hidup		
4	Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar)		
5	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan		
6	Surat Keterangan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum dari Pengadilan/Kejaksaan		
7	Surat Rekomendasi dari Gubernur bagi Bupati/Walikota (rekomendasi dari Mendagri bagi Gubernur diurus oleh Tim Pusat)		
8	Fotokopi Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (bentuk kelembagaan dinas dalduk dan KB)		
9	Laporan evaluasi Kampung KB per Desember 2016 (K/L lintas sektor yang terlibat)		
10	Fotokopi cukilan RKAKL dalam bidang KKBPK dan APBD Prov/Kab/Kota		
11	Laporan Mekop tadua tahun terakhir		
12	Laporan dukungan operasional lini lapangan dalam pembinaan KB/KS		
13	SK Pengangkatan PNS sebagai PLKB serta SK Gubernur/Bupati/ Walikota terkait pemenuhan tenaga PLKB Non PNS di wilayahnya		
14	Fotokopi Perda atau PerGub/Perbup/Perwal atau SK Gubernur/Bupati/Walikota atau dokumen Grand Desain Pembangunan Kuantitas Penduduk		
15	Data pendukung berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, dll		
16	Buku Profil lengkap memuat data tersebut diatas 2 (dua) rangkap		

……………., …………………………..20….

Ketua Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

Sekretaris Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

LAMPIRAN 5B

FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN CALON PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRA KARYA

NO.	BERKAS/DOKUMEN YANG HARUS ADA	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Fotokopi Piagam Penghargaan WKK/DKK/CKK yang telah diterima		
2	Surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota		
3	Daftar Riwayat Hidup		
4	Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar)		
5	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan		
6	Surat Keterangan tidak pernah terlibat dalam masalah hokum dari Pengadilan/Kejaksaan		
7	Fotokopi Kartu KB atau Surat Keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah maupun swasta		
8	Surat Undangan menjadi narasumber dalam bidang KKBPK dalam 2 tahun terakhir		
9	SK Pengangkatan/Surat Keterangan menjadi pengurus organisasi tingkat nasional/daerah		
10	Fotokopi tulisan/artikel dalam bidang KKBPK yang telah dipublikasi di media cetak		
11	Data pendukung berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, dll		
12	Buku Profil lengkap memuat data tersebut diatas 2 (dua) rangkap		

……………., …………………………..20….

Ketua Tim Teknis Penilai Provinsi,

Sekretaris Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

(……………………………….)

LAMPIRAN 5C

FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) BAGI KETUA TP PKK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO.	BERKAS/DOKUMEN YANG HARUS ADA	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Fotokopi SK Pengangkatan dalam Jabatan		
2	Daftar Riwayat Hidup		
3	Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar)		
4	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan		
5	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku		
6	Surat Rekomendasi dari Ketua TP PKK Provinsi bagi Ketua TP PKK Kabupaten/Kota(rekomendasi dari Ketua TP PKK Pusat bagi Ketua TP PKK Provinsi diurus oleh Tim Pusat		
7	Fotokopi Kartu KB atau Surat Keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah maupun swasta		
8	Fotokopi SK Gub/Bup/Wal atau SK/Surat Edaran Ketua TP PKK dalam pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan Dasa Wisma		
9	Fotokopi SK Gub/Bup/Wal atau SK/Surat Edaran Ketua TP PKK dalam pelaksanaan operasional program KKBPK		
10	Fotokopi SK Gub/Bup/Wal atau SK/Surat Edaran Ketua TP PKK dalam pelaksanaan Kesrak PKK KB Kesehatan		
11	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba BKB		
12	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba BKR		
13	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba BKL		
14	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba kelompok UPPKS/UP2 PKK		
15	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba PIK R/M		
16	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba Kesrak PKK KB Kes		
17	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba Posyandu		
18	Fotokopi piagam penghargaan/juara lomba PHBS		
19	Data pendukung berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, dll		
20	Buku Profil lengkap memuat data tersebut diatas 2 (dua) rangkap		

……………., …………………………..20….

Ketua Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………..)

Sekretaris Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………..)

LAMPIRAN 5D

FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN WIRA KARYA KENCANA (WKK)

NO.	BERKAS/DOKUMEN YANG HARUS ADA	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Daftar Riwayat Hidup		
2	Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar)		
3	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan		
4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku		
5	Surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota		
6	Fotokopi Kartu KB atau Surat Keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah maupun swasta		
7	Surat Undangan menjadi narasumber dalam bidang Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga dalam 2 tahun terakhir		
8	Fotokopi tulisan/artikel dalam bidang Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga yang telah dipublikasi di media cetak		
9	Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang pernah diterima dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga		
10	Data pendukung berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, dll		
11	Buku Profil lengkap memuat data tersebut diatas 2 (dua) rangkap		

……………., …………………………...20….

Ketua Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

Sekretaris Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

LAMPIRAN 5E

FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN DHARMA KARYA KENCANA (DKK)

NO.	BERKAS/DOKUMEN YANG HARUS ADA	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Daftar Riwayat Hidup		
2	Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar)		
3	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan		
4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku		
5	Surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota		
6	Fotokopi Kartu KB atau Surat Keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah maupun swasta		
7	Foto/Dokumen terkait dukungan sarana/anggaran atau tenaga terhadap program KKBPK		
8	Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang pernah diterima dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga		
9	Data pendukung berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, dll		
10	Buku Profil lengkap memuat data tersebut diatas 2 (dua) rangkap		

……………., …………………………..20….

Ketua Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

Sekretaris Tim Teknis Penilai Provinsi,

(……………………………….)

LAMPIRAN 5F

FORMULIR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS USULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN CIPTA KARYA KENCANA (CKK)

NO.	BERKAS/DOKUMEN YANG HARUS ADA	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK
1	Daftar Riwayat Hidup		
2	Pasfoto 4x6 berwarna (2 lembar)		
3	Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan		
4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku		
5	Surat Rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota		
6	Fotokopi Kartu KB atau Surat Keterangan ber-KB dari dokter/bidan pemerintah maupun swasta		
7	Foto/Dokumen dan narasi singkat terkait karya cipta/konsep kreasi yang mendukung pelaksanaan program KKBPK		
8	Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang pernah diterima dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga		
9	Data pendukung berupa foto-foto kegiatan, laporan kegiatan, dll		
10	Buku Profil lengkap memuat data tersebut diatas 2 (dua) rangkap		

……………., …………………………...20….

Ketua Tim Teknis Penilai Provinsi,

(………………………………)

Sekretaris Tim Teknis Penilai Provinsi,

(………………………………)

LAMPIRAN 6

GAMBAR DAN DESKRIPSI LENCANA TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KKBPK

1. SATYALANCANA PEMBANGUNAN



Diberikan oleh Presiden RI

Ciri-ciri :

- Warna dasar pita hijau dan diberi 5 lajur merah yang membagi pita dalam 6 bagian yang sama lebarnya.
- Logam Kuningan, berbentuk bundar berbentuk bundar berwarna perunggu dengan disisi luar setangkai kapas dan setangkai padi yang masing-masing terdiri dari 17 daun beserta 8 bunga kapas dan 45 buah padi yang mengingatkan pada detik yang bersejarah yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17-9-1945, terdapat gambar dari alat-alat tehnik (jangka, siku-siku, dan palu) dengan latar belakang daratan, lautan, dan udara sebagai lambang pembangunan dalam segala lapangan, baik di darat, laut maupun di udara, beserta satu bintang bersudut lima yang mengandung dasar negara (Pancasila)". Di tengah-tengah antara gambar alat-alat tehnik dan bintang tersebut di atas terdapat tulisan "PEMBANGUNAN". Bagian belakang terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA".

2. SATYALANCANA WIRA KARYA (SWK)



Diberikan oleh Presiden RI

Ciri-ciri :

- Warna dasar pita hijau dan diberi 5 lajur putih yang membagi pita dalam 6 bagian yang sama lebarnya.
- Logam Kuningan, berbentuk bundar berwarna perunggu dengan di sisi luar setangkai kapas dan padi, masing-masing terdiri dari 17 daun beserta 8 bunga kapas dan 45 buah padi, yang selain melambangkan Keadilan Sosial atau Kesejahteraan, mengingatkan pula pada detik yang bersejarah, yaitu Hari Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945. Pada Satyalancana di sebelah atas tampak gambar bintang bersudut lima (Pancasila Negara), sedangkan di tengah-tengah antara bintang tersebut dengan gambar pelita terdapat tulisan "WIRA KARYA". Bagian Belakang Terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA"

3. MANGGALA KARYA KENCANA (MKK)



Diberikan oleh Kepala BKKBN

Ciri-ciri :

- Warna Biru Muda
- Logam Warna Emas (Gold), berlogo BKKBN dan bertuliskan Manggala Karya Kencana

4. **WIRA KARYA KENCANA (WKK)**



Diberikan oleh Kepala BKKBN

Ciri-ciri :

- Warna Hijau Muda
- Logam Warna Emas (Gold), berlogo BKKBN dan bertuliskan Wira Karya Kencana

5. **DHARMA KARYA KENCANA (DKK)**



Diberikan oleh Kepala BKKBN

Ciri-ciri :

- Warna Kuning
- Logam Warna Emas (Gold), berlogo BKKBN dan bertuliskan Dharma Karya Kencana

6. **CIPTA KARYA KENCANA (CKK)**



Diberikan oleh Kepala BKKBN

Ciri-ciri :

- Warna Merah
- Logam Warna Emas (Gold), berlogo BKKBN dan bertuliskan

LAMPIRAN 7

SISTEMATIKA PENULISAN PROFIL

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. BAB I Pendahuluan
   a. Latar belakang
   b. Tujuan
   c. Kerangka Pikir
   d. Sumber data
   e. Batasan pengertian

4. BAB II Gambaran Umum
   a. Letak geografis
   b. Kondisi demografi
   c. Pemerintahan

5. BAB III Dukungan Komitmen/ Politis
   a. Regulasi terkait program KKBPK Bentuk kelembagaan yang menangani bidang Pengendalian
   b. Bentuk kelembagaan/ nomenklatur Dinas Penduduk dan KB (utuh/merger)
   c. Dukungan/ bantuan Operasional (sarana, anggaran, tenaga) dalam program KKBPK (2 tahun terakhir)

6. BAB IV Capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
   a. Pencapaian Peserta Baru (PB)
   b. Jumlah Peserta KB Baru MKJP dan non MKJP
   c. Peserta KB Baru Pria
   d. Pencapaian KB Aktif (PA)
   e. TFR, CPR
   f. Unmet Need
   g. ASFR (15-19 tahun) per 1000 kelahiran
   h. Kelompok kegiatan ketahanan keluarga

7. BAB VI Penghargaan/ Prestasi terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga selama 2 tahun terakhir

8. BAB VII Penutup

9. LAMPIRAN
   a. Biodata
   b. Resume calon penerima penghargaan yang memuat hasil penilaian dari tiap indikator penilaian
   c. Uraian jasa/prestasi
   d. Fotokopi kelengkapan administrasi (KTP, Skep Pengangkatan Pertama, Skep Jabatan, Skep Pangkat Terakhir, dll.)
   e. Fotokopi Surat Rekomendasi
      - Rekomendasi gubernur untuk usulan calon penerima SP dan MKK bagi bupati dan walikota
      - Rekomendasi Ketua TP PKK Provinsi untuk usulan calon penerima MKK bagi Ketua TP PKK Kabupaten dan Kota

- Rekomendasi dari gubernur/bupati/walikota untuk usulan calon penerima SWK, DKK, WKK dan CKK

f. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat dalam Masalah Hukum
g. Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat dalam Masalah Hukum yang diterbitkan pengadilan/ kejaksaan bagi calon penerima SP, SWK, MKK bagi gubernur/bupati/walikota
h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku bagi calon penerima MKK TP PKK, WKK, DKK, dan CKK
i. Dokumentasi lain (fotokopi penghargaan, foto kegiatan yang mendukung, dll.)